

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja. Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian dokumen.

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2022 merupakan dokumen rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga di dalam rencana kerja yang berisikan program dan kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah sebagai wujud dari kinerja Perangkat daerah pada tahun 2022, tentunya program dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Singkawang yang mengusung visi Kota Singkawang yaitu Singkawang Hebat.

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2018-2022 yaitu didalam prioritas kinerja Pembangunan Kota Singkawang urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan maupun Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022.

### **I.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2022 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008– 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022;
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang tahun 2022 disusun untuk menjadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Singkawang dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Singkawang tahun 2018-2022.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program dan kegiatan yang direncanakan tahun anggaran 2022;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2018-2022;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan pembandingan Renja tahun sebelumnya maupun tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen agenda pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan tahun 2022;
5. Penetapan pelaksanaan Program kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2022.

### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam Renja PD.

#### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu**

Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review

terhadap rancangan awal PD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **Bab III Tujuan dan Sasaran PD**

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan tugas pokok dan fungsi PD, tujuan dan sasaran Renja PD.

### **Bab IV Rencana kerja dan pendanaan**

Berisikan rencana kerja kegiatan secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja PD) dan capaian kinerja yang direncanakan Renstra PD.

### **Bab V Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian mengenai pelaksanaan kinerja Renja tersebut dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja tersebut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Berdasarkan hasil kinerja yang dapat diukur secara akuntabilitas adalah program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 adalah evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 dan capaian kinerja renstra sampai dengan triwulan I tahun 2022 yang menjadi barometer dan tindak lanjut di tahun selanjutnya.

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sampai dengan triwulan I tahun 2021 melaksanakan 4 (Empat) Program yang terinci dalam 85 (delapan puluh lima) kegiatan, dimana 7 (tujuh) program merupakan penunjang urusan lainnya dan 4 (Empat) program merupakan penunjang urusan keuangan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2020 dan capaian Renstra sampai dengan triwulan I tahun 2021 tersaji dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020**  
**dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah s/d Triwulan I Tahun 2021**  
**Kota Singkawang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021 tw I)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.4.02.02.001	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>32,19%</b>	<b>32,19%</b>			
4.02.4.02.02.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%		100%	29,96%	29,96%			
4.02.4.02.02.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%		100%	30,98%	30,98%			

4.02.4.02.02.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%		100%	31,05%	31,05%			
4.02.4.02.02.001.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%		100%	40%	40%			
4.02.4.02.02.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%		100%	40%	40%			
4.02.4.02.02.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan jasa Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%		100%	39,10%	39,10%			
4.02.4.02.02.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%		100%	25,36%	25,36%			
4.02.4.02.02.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%		100%	34,73%	34,73%			
4.02.4.02.02.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan	100%		0%	0%	0%			
4.02.4.02.02.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%		100%	36,85%	36,85%			
4.02.4.02.02.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%		100%	24,61%	24,61%			
4.02.4.02.001.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	100%		100%	40%	40%			
4.02.4.02.02.001.020	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran		100%		100%	39,90%	39,90%			

4.02.4.02.02.001.025	Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	Cakupan Tamu daerah yang disediakan fasilitasnya	100%		100%	6%	6%			
<b>4.02.4.02.02.002</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>28,77%</b>	<b>28,77%</b>			
4.024.02.02.002.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%		100%	36,70%	36,70%			
4.02.4.02.02.002.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%		100%	39,24%	39,24%			
4.02.4.02.02.002.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%		100%	39,22%	39,22%			
4.02.4.02.02.002.011	Pengadaan Tanah	Cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan	100%		100%	0,00%	0,00%			
4.02.4.02.02.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%		100%	39,68%	39,68%			
4.02.4.02.02.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%		100%	24,69%	24,69%			
4.02.4.02.02.002.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%		100%	21,90%	21,90%			
<b>4.02.4.02.02.003.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>			
4.02.4.02.02.003.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	195 stel		65 stel	65 stel	100%			
4.02.4.02.02.003.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 stel		65 stel	65 stel	100%			

4.02.4.02.02.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>32,28%</b>	<b>32,28%</b>			
4.02.4.02.02.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%		100%	20%	20%			
4.02.4.02.02.005.010	Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100%		100%	24,78%	24,78%			
4.02.4.02.02.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>			
4.02.4.02.02.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
4.02.4.02.02.006.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.006.005	Penyusunan LAKIP SKPD	Dokumen LAKIP SKPD	5 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.006.006	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra SKPD	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.006.007	Penyusunan LPPD / LKPJ	Dokumen LPPD / LKPJ	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.006.008	Penyusunan Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.006.010	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	10 dokumen		2 dokumen	3 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.006.012	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja Perangkat Daerah	5 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%			

4.02.4.02.02.007	Program Penguatan Transparansi Publik	Persentase transparansi public	100%		100%	40%	40%			
4.02.4.02.02.007.001	Expo Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan expo	5 kegiatan		1 kegiatan	2 kegiatan	100%			
4.02.4.02.02.007.003	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan Hari-hari Besar nasional dan Daerah	4 kegiatan		-	-	-			
4.02.4.02.02.017	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	88%			
		Persentase Silpa terhadap APBD	0%		0%	44,94%	44,94%			
		Persentase aset-aset daerah yang terdata	100%		100%	31,60%	31,60%			
4.02.4.02.02.017.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang	5 perda		1 perda	2 perda	100%			
4.02.4.02.02.017.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD	5 perwako		1 perwako	2 perwako	100%			
4.02.4.02.02.017.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	5 perda		1 perda	2 perda	100%			
4.02.4.02.02.017.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD	5 perwako		1 perwako	2 perwako	100%			

4.02.4.02.02.017.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	5 perda		1 perda	2 perda	100%			
4.02.4.02.02.017.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	5 perwako		1 perwako	2 perwako	100%			
4.02.4.02.02.017.020	Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan	100%		60 bulan	34%	34%			
4.02.4.02.02.017.021	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	25 dokumen		5 dokumen	7 dokumen	40%			
4.02.4.02.02.017.022	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	Cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	100%		100%	29%	29%			
4.02.4.02.02.017.023	Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan	100%		100%	40%	40%			
4.02.4.02.02.017.024	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer	20 laporan		4 laporan	8 laporan	100%			
4.02.4.02.02.017.025	Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS	70 Bulan		14 bulan	28 bulan	100%			

4.02.4.02.02.017.026	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBMMD, Laporan Semester dan Tahunan Barang	10 dokumen		2 dokumen	4 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.017.027	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 perangkat		1 perangkat	2 perangkat	100%			
4.02.4.02.02.017.028	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%			
4.02.4.02.02.017.029	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	500 orang		100 orang	200 orang	100%			
4.02.4.02.02.017.030	Serah Terima Aset	Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset	5 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%			
4.02.4.02.02.017.032	Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	5 aplikasi		1 aplikasi	2 aplikasi	100%			
4.02.4.02.02.017.033	FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah OPD peserta workshop	26 OPD		26 opd	52 opd	100%			

4.02.4.02.02.017.034	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	5 paket		1 paket	2 paket	100%			
4.02.4.02.02.017.037	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	90 laporan		18 laporan	36 laporan	100%			
4.02.4.02.02.017.039	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	100%		100%	40%	40%			
4.02.4.02.02.017.040	Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.017.041	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	60 laporan		12 laporan	24 laporan	100%			
4.02.4.02.02.017.042	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda	30 dokumen		6 dokumen	12 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.017.043	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD	60 laporan		12 bulan/laporan	24 bulan/laporan	100%			
4.02.4.02.02.017.044	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD	Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD	30 dokumen		6 dokumen	12 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.017.047	Distribusi Barang Milik Daerah	Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD	21 OPD		21 opd	42 opd	100%			
4.02.4.02.02.017.050	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kodefikasi BMD	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	0%			

4.02.4.02.02.017.051	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.017.060	Workshop Penatausahaan/Sosialisasi Perwako Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran	800 orang		160 orang	0	0%			
4.02.4.02.02.017.054	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2020	Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri	26 OPD		26 OPD	52 OPD	100%			
4.02.4.02.02.017.055.	Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Permendagri	600 orang		120 orang	120 orang	100%			
4.02.4.02.02.017.056.	Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan	Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	30%			
4.02.4.02.02.017.057.	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	30%			
4.02.4.02.02.017.058.	Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD	Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	26 OPD		26 OPD	0	0			
4.02.4.02.02.017.060.	Penyusunan Perwako Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perwako Barang Milik Daerah yang disusun	-	-	-	-	0			

<b>4.02.4.02.02.040</b>	<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)</b>	<b>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>41,50%</b>		<b>0,82%</b>	<b>26,13%</b>	<b>26,13%</b>			
4.02.4.02.02.040.001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.002	Penertiban Izin Pemasangan Reklame	Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.003	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	10 dokumen		2 dokumen	4 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.004	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.005	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.006	Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	20 dokumen		4 dokumen	8 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.007	Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.008	Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	Jumlah Perwako PBB-P2	5 perwako		1 perwako	2 perwako	100%			

4.02.4.02.02.040.011	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	375.000 SPPT		75.000 SPPT	150.000 SPPT	100%			
4.02.4.02.02.040.012	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	5 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.014	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah	5 basis data		1 basis data	2 basis data	100%			
4.02.4.02.02.040.015	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.018	Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	Jumlah produk hukum pajak daerah	5 perda, 10 perwako		1 perda, 2 perwako	6	100%			
4.02.4.02.02.040.019	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi	10 dokumen		2 dokumen	4 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.020	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah	10 dokumen		2 dokumen	4 dokumen	100%			
4.02.4.02.02.040.021	Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	Jumlah dokumen Pemutakiran Data Piutang PBB-P2	4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	0%			
4.02.4.02.02.055.	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
4.02.4.02.02.055.001.	Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2	Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan	150.000 OP		30.000 op	0 op	0,00%			

5.02.01.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Predikat Nilai Sakip</b>								
5.02.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>1,59%</b>	<b>1,59%</b>
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						2 Dokumen	0,00%	0,00%
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun						1 Dokumen	0,00%	0,00%
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun						4 Dokumen	0,00%	0,00%
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun						4 Dokumen	0,00%	0,00%
5.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun						2 Dokumen	0,00%	0,00%
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>						<b>100%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,33%</b>

5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia						100%	5,00%	5,00%
5.02.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non-PNS yang menunjang pengelolaan keuangan BKD						100%	5,00%	5,00%
5.02.01.2.02.03.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun						5 Dokumen	0,00%	0,00%
<b>5.02.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>						<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan						75 stel	0,00%	0,00%
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta diklat formal						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum yang disediakan</b>						<b>100%</b>	<b>4,00%</b>	<b>4,00%</b>
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan						100%	5,00%	5,00%
5.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan alat kebersihan dan perabot kantor yang disediakan						100%	5,00%	5,00%

5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cakupan barang cetakan dan pengadaan yang disediakan						100%	2,00%	2,00%
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	cakupan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan						100%	2,00%	2,00%
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan						100%	10,00%	10,00%
<b>5.02.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan</b>						<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5.02.01.2.07.02.	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan peningkatan gedung kantor						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>						<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Cakupan konsumsi rapat, konsumsi tamu dan konsumsi pimpinan yang disediakan						100%	0,00%	0,00%

5.02.01.2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menyampaikan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.09.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jabatan yang disediakan						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara						100%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan gedung kantor yang dipelihara						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.02.</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.02.2.01.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>							100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS Perubahan						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi						100%	0,00%	0,00%

5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA dan DPA Perubahan SKPD yang dilakukan review						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPA SKPD Perubahan yang terverifikasi						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase tercapainya Perda tentang APBD						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase tercapainya Perda tentang Perubahan APBD						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase tercapainya Regulasi di Bidang Anggaran						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan Belanja Daerah						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.02.2.02.</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>							100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Pengendalian administrasi penyediaan dana						100%	0,00%	0,00%

5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Jumlah laporan rekapitulasi pemotongan pajak pegawai/pihak ketiga						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.02.2.03.</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu</b>						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%

5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen						100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							100%	0,00%	0,00%
5.02.02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya belanja tidak terduga						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.03.</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>							100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.03.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>							100%	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen RKBMD						100%	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD berupa laporan semesteran dan tahunan						100%	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen						100%	0,00%	0,00%

5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kepemilikan BMD						100%	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penilaian BMD						100%	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sinkronisasi Penatausahaan dan penyajian laporan barang untuk daerah kota singkawang						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.04.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target</b>						100%	0,00%	0,00%
<b>5.02.04.2.01.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pajak Daerah Sektor PBB dan BPHTB</b>						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.01.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan sarana dan prasarana pajak daerah yang diadakan						100%	0,00%	0,00%

5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun						100%	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diuraikan beberapa hal diantaranya :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    - Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
    - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
    - Pengadaan Tanah
    - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
    - Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
  4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
    - Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan
    - Inventarisasi Barang Milik Daerah
    - Serah Terima Aset
    - Penilaian Barang Milik Daerah
    - Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah
    - Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah
    - Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD
  5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah
    - Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2
- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
  1. Program kegiatan tidak dilaksanakan.
  2. Tidak dianggarkannya Program kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2019 dan 2020 maupun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 2019.

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dari 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah**  
**Kota Singkawang**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKD				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	-	14,99	15,87	16,60	17,14	14,89	n/a	16,60	17,14		
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)												
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP		

### **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Setelah dilakukan analisa atas hasil evaluasi dalam pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang maka terdapat beberapa isu penting penyelenggaraan perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD). Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh BKD adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan masih rendah;
2. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib;
3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
4. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

### **II.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BKD adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Kota Singkawang (rancangan renja 2022 mapping)**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Predikat Nilai Sakip</b>		<b>17.362.887.310</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Predikat Nilai Sakip</b>	<b>BB</b>	<b>17.362.887.310</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>64.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>64.000.000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	3 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	3 Dokumen	15.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	6.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	6.000.000	

4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	8.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	8.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	2 dokumen	6.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	6.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang dievaluasi	3 dokumen	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	3 Dokumen	15.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>13.269.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>13.269.000.000</b>	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Cakupan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	100%	12.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Cakupan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	100%	12.000.000.000	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pegawai Non PNS yang menunjang&pengelola keuangan BKD	100%	1.200.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pegawai Non PNS yang menunjang&pengelola keuangan BKD	100%	1.200.000.000	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tercapainya persentase penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	100%	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tercapainya persentase penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	100%	40.000.000	

11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Tercapainya persentase pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Tercapainya persentase pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	15.000.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	9.000.000	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	5.000.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	10.000.000	
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	10.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>185.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>185.000.000</b>	

16	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	65 stel	65.000.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	65 stel	65.000.000	
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta diklat formal	10 orang	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta diklat formal	10 orang	120.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Umum yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>1.445.300.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Umum yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>1.445.300.000</b>	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	20.000.000	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100%	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100%	45.000.000	
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Cakupan alat kebersihan dan perabot kantor yang disediakan	100%	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Cakupan alat kebersihan dan perabot kantor yang disediakan	100%	35.000.000	

21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cakupan barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	100%	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cakupan barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	100%	25.000.000	
22	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	7.800.000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	7.800.000	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	100%	1.312.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	100%	1.312.500.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>1.346.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>1.346.000.000</b>	
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasa atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasa atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 unit	500.000.000	
25	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan	3 unit	90.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan	3 unit	90.000.000	

26	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeler kantor yang diadakan	100%	80.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeler kantor yang diadakan	100%	80.000.000	
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan kantor yang diadakan	100%	176.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan kantor yang diadakan	100%	176.000.000	
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Cakupan Peningkatan gedung kantor	100%	400.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Cakupan Peningkatan gedung kantor	100%	400.000.000	
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana & prasarana gedung kantor yang diadakan	100%	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana & prasarana gedung kantor yang diadakan	100%	100.000.000	
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana & prasarana gedung kantor yang diadakan	100%	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana & prasarana gedung kantor yang diadakan	100%	100.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>		<b>468.087.310</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>		<b>468.087.310</b>	
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100 %	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100 %	8.000.000	

32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang disediakan	100 %	400.087.310	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100 %	400.087.310	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Cakupan konsumsi rapat, konsumsi tamu & Konsumsi pimpinan yang disediakan	100 %	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Cakupan konsumsi rapat, konsumsi tamu & Konsumsi pimpinan yang disediakan	100 %	60.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>565.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>565.500.000</b>	
34	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jabatan yang disediakan	100%	50.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jabatan yang disediakan	100%	50.000.000	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	200.000.000	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	115.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	115.500.000	

37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya		Cakupan gedung kantor yang dipelihara	100%	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya		Cakupan gedung kantor yang dipelihara	100%	100.000.000	
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan sarana & prasarana gedung kantor yang dipelihara	100%	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan sarana & prasarana gedung kantor yang dipelihara	100%	100.000.000	
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>4.142.066.541</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>4.142.066.541</b>	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Anggaran tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.009.700.000</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Anggaran tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.009.700.000</b>	
39	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS	100%	121.400.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS	100%	121.400.000	
40	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS Perubahan	100%	124.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS Perubahan	100%	124.500.000	
41	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Tercapainya Persentase dokumen RKA-SKPD yang terverifikasi	100%	43.600.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Tercapainya Persentase dokumen RKA-SKPD yang terverifikasi	100%	43.600.000	

42	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Tercapainya Persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi	100%	46.200.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Tercapainya Persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi	100%	46.200.000	
43	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Persentase DPA dan DPA Perubahan SKPD yang dilakukan review	100%	23.800.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Persentase DPA dan DPA Perubahan SKPD yang dilakukan review	100%	23.800.000	
44	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Tercapainya persentase dokumen DPA SKPD Perubahan yang terverifikasi	100%	22.900.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Tercapainya persentase dokumen DPA SKPD Perubahan yang terverifikasi	100%	22.900.000	
45	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Persentase tercapainya perda tentang APBD	100%	223.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Persentase tercapainya perda tentang APBD	100%	223.500.000	
46	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Persentase tercapainya perda tentang Perubahan APBD	100%	181.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Persentase tercapainya perda tentang Perubahan APBD	100%	181.600.000	
47	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Persentase tercapainya Regulasi di Bidang Anggaran	100%	59.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Persentase tercapainya Regulasi di Bidang Anggaran	100%	59.000.000	
48	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan	100%	21.800.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan	100%	21.800.000	

49	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan Belanja Daerah	100%	141.400.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan Belanja Daerah	100%	141.400.000	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu</b>		<b>334.900.00000</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu</b>		<b>334.900.00000</b>	
50	Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah laporan	12 bulan	40.300.000	Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah laporan	12 bulan	40.300.000	
51	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah dokumen pengendalian administrasi penyediaan dana	4 dokumen	23.400.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah dokumen pengendalian administrasi penyediaan dana	4 dokumen	23.400.000	
52	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen	174.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen yang disusun	12 dokumen	174.000.000	
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan		Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	12 Laporan	5.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan		Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	12 Laporan	5.300.000	

	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga/PFK					Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga/PFK					
54	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait		Jumlah Laporan	12 bulan	42.700.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait		Jumlah Laporan	12 bulan	42.700.000	
55	Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	49.200.000	Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	49.200.000	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>395.900.000</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>395.900.000</b>	
56	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah laporan	12 bulan	4.200.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah laporan	12 bulan	4.200.000	

57	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	9.700.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	9.700.000
58	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA		Jumlah Laporan yang disusun	7 Laporan	252.400.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA		Jumlah Laporan yang disusun	7 Laporan	252.400.000
59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	73.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	73.400.000
60	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen	2 dokumen	5.300.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen	2 dokumen	5.300.000
61	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi		Jumlah dokumen	2 dokumen	11.400.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi		Jumlah dokumen	2 dokumen	11.400.000

	Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah					
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Realisasi belanja tidak terduga</b>	<b>100%</b>	<b>2.023.393.931</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Realisasi belanja tidak terduga</b>	<b>100%</b>	<b>2.023.393.931</b>	
62	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	370.000.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	370.000.000	
62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Terpenuhinya belanja tidak terduga	1 tahun	1.653.393.931	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Terpenuhinya belanja tidak terduga	1 tahun	1.653.393.931	
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Presentase Implemntasi dan Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>378.172.610</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Presentase Implemntasi dan Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>378.172.610</b>	
63	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	378.172.610	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	378.172.610	
III	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Aset-aset daerah yang terdata</b>	<b>100%</b>	<b>817.400.000</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Aset-aset daerah yang terdata</b>	<b>100%</b>	<b>817.400.000</b>	

	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>817.400.000</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>817.400.000</b>	
64	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Persentase OPD yang menyampaikan Dokumen RKBMD	100%	17.300.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Persentase OPD yang menyampaikan Dokumen RKBMD	100%	17.300.000	
65	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 dokumen	78.900.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 dokumen	78.900.000	
66	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	25.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	25.000.000	
67	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen kepemilikan BMD	1 dokumen	468.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen kepemilikan BMD	1 dokumen	468.000.000	
68	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Penilaian BMD	1 dokumen	34.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Penilaian BMD	1 dokumen	34.000.000	
69	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	4 dokumen	143.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	4 dokumen	143.000.000	

70	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Sinkronisasi penatausahaan dan penyajian laporan barang untuk daerah	2 kegiatan	51.200.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Sinkronisasi penatausahaan dan penyajian laporan barang untuk daerah	2 kegiatan	51.200.000	
IV	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase Penerimaan Pendapata Asli Daerah ( PAD) terhadap target</b>	<b>100%</b>	<b>3.099.500.000</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase Penerimaan Pendapata Asli Daerah ( PAD) terhadap target</b>	<b>100%</b>	<b>3.099.500.000</b>	
	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>		<b>3.099.500.000</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>		<b>3.099.500.000</b>	
71	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	121.500.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	121.500.000	
72	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	67.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	67.000.000	

73	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	460.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	460.000.000	
74	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Cakupan sarana dan prasarana pajak daerah yang diadakan	100%	555.800.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Cakupan sarana dan prasarana pajak daerah yang diadakan	100%	555.800.000	
75	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	67.500.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	67.500.000	
76	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	224.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	224.000.000	
77	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	137.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	137.000.000	

	Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
78	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	540.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	540.000.000	
79	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	242.200.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	242.200.000	
80	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	297.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	297.000.000	
81	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	141.600.000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	141.600.000	

82	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	37.600.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	37.600.000	
83	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	149.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	149.000.000	
84	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	59.300.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	59.300.000	
<b>TOTAL PAGU</b>					<b>25.421.853.851</b>						<b>25.421.853.851</b>

## **II.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program dan Kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah.

Untuk Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah. Penelaahan usulan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari**  
**Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kota Singkawang**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pada tahun 2022, Tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP tahun 2022 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP tahun 2022

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP 4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP 4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil

		PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP 4: Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui peningkatan EBT
		PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP 4: Peningkatan Daya dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP 4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5: Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

### III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Singkawang Tahun 2022, Tema Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2022 adalah **“Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Singkawang Hebat 2022”** dengan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Prioritas Daerah dan Program Prioritas dalam Rancangan RKPD tahun 2022

Prioritas Daerah	Program Prioritas
PD 1: Peningkatan Kualitas Pendidikan yang merata	PP 1: Pendidikan Anak Usia Dini
	PP 2: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	PP 3: Penyelenggaraan Pendidikan SD
	PP 4: Penyelenggaraan Pendidikan SMP
	PP 5: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan SD
	PP 6: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP
	PP 7: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	PP 8: Manajemen Pelayanan Pendidikan
	PP 9: Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Dasar
PD 2: Peningkatan Derajat Kesehatan	PP 1: Obat dan Perbekalan Kesehatan
	PP 2: Upaya Kesehatan Masyarakat
	PP 3: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	PP 4: Perbaikan Gizi Masyarakat
	PP 5: Pengembangan Lingkungan Sehat
	PP 6: Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	PP 7: Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	PP 8: Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

		PP 9:	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Obat dan Makanan
		PP 10:	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		PP 11:	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		PP 12:	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
		PP 13:	Keluarga Berencana
		PP 14:	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri
PD 3:	Penyediaan utilitas dan sarana prasarana public	PP 1:	Pengembangan Perumahan
		PP 2:	Revitalisasi Penyediaan Air Bersih
		PP 3:	Penyediaan dan pengelolaan air baku
		PP 4:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
		PP 5:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		PP 6:	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan
		PP 7:	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		PP 8:	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
		PP 9:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
PD 4:	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	PP 1:	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- PP 2: Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal
- PP 3: Peningkatan iklim dan realisasi investasi
- PP 4: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- PP 5: Pengembangan Destinasi Pariwisata
- PP 6: Pengembangan Kemitraan
- PP 7: Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- PP 8: Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- PP 9: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- PP 10: Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- PP 11: Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- PP 12: Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- PP 13: Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- PP 14: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- PP 15: Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- PP 16: Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Pangan
- PP 17: Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas
- PP 18: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

		PP 19:	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
PD 5:	Pemantapan kinerja aparatur birokrasi	PP 1:	Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov
		PP 2:	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		PP 3:	Pengembangan Kinerja Organisasi
		PP 4:	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		PP 5:	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PP 6:	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
		PP 7:	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
		PP 8:	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
PD 6	Pengembangan dan penataan kawasan	PP 1:	Pembangunan Jalan Dan Jembatan
		PP 2:	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		PP 3:	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		PP 4:	Pengembangan Perumahan
		PP 5:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
		PP 6:	Pembangunan Turap/Talud Bronjong
		PP 7:	Pengendalian Banjir

PD 7	Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	PP 1:	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		PP 2:	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		PP 3:	Peningkatan pengendalian polusi
		PP 4:	Perencanaan Tata Ruang
		PP 5:	Pemanfaatan Ruang
		PP 6:	Pengendalian pemanfaatan ruang
PD 8	Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan	PP 1:	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		PP 2:	Pengembangan Pendidikan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat
		PP 3:	Pengembangan Nilai Budaya
		PP 4:	Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
			Persentase PAD terhadap pendapatan	16,60 %

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023  
Kota Singkawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Predikat Nilai Sakip</b>		<b>BB</b>	<b>17.362.887.310</b>	<b>APBD</b>		<b>BB</b>	<b>19.099.176.041</b>
5.02.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun</b>	<b>Sekretariat BKD</b>	<b>100%</b>	<b>64.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>70.400.000</b>
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		3 Dokumen	15.000.000			3 Dokumen	16.500.000
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	6.000.000			1 Dokumen	6.600.000
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	6.000.000			1 Dokumen	6.600.000

5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	8.000.000			1 Dokumen	8.800.000
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	8.000.000			1 Dokumen	8.800.000
5.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		2 Dokumen	6.000.000			2 Dokumen	6.600.000
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		3 Dokumen	15.000.000			2 Dokumen	16.500.000
<b>5.02.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>	<b>Sekretariat BKD</b>	<b>100%</b>	<b>13.269.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>14.595.900.000</b>
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		100%	12.000.000.000			100%	13.200.000.000
5.02.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non-PNS yang menunjang pengelolaan keuangan BKD		100%	1.200.000.000			100%	1.320.000.000
5.02.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya persentase penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		100%	40.000.000			100%	44.000.000
5.02.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tercapainya persentase pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	15.000.000			100%	16.500.000

5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen	9.000.000			1 dokumen	9.900.000
5.02.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen yang disusun		2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	5.500.000
<b>5.02.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Sekretariat BKD</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>
5.02.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen	10.000.000	APBD		100%	11.000.000
5.02.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen	10.000.000	APBD		100%	11.000.000
<b>5.02.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>185.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>203.500.000</b>
5.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		65 stel	65.000.000	APBD		65 stel	71.500.000
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta diklat formal		10 orang	120.000.000	APBD		10 orang	132.000.000
<b>5.02.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan Administrasi Umum yang disediakan</b>		<b>100%</b>	<b>1.445.300.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.589.830.000</b>

5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		100%	20.000.000	APBD		100%	22.000.000
5.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan alat tulis kantor yang disediakan		100%	45.000.000	APBD		100%	49.500.000
5.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan alat kebersihan dan perabot kantor yang disediakan		100%	35.000.000	APBD		100%	38.500.000
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	cakupan barang cetakan dan pengandaan yang disediakan		100%	25.000.000	APBD		100%	27.500.000
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	cakupan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan		100%	7.800.000	APBD		100%	8.580.000
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan		100%	1.312.500.000	APBD		100%	1.443.750.000
<b>5.02.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan</b>		<b>100%</b>	<b>1.346.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.480.600.000</b>
5.02.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		1 unit	500.000.000	APBD		1 unit	550.000.000

5.02.01.2.07.02.	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan		3 unit	90.000.000	APBD		3 unit	99.000.000
5.02.01.2.07.05.	Pengadaan mebel	Jumlah mebeler kantor yang diadakan		100%	80.000.000	APBD		100%	88.000.000
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan		100%	176.000.000	APBD		100%	193.600.000
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan peningkatan gedung kantor		100%	400.000.000	APBD		100%	440.000.000
5.02.01.2.07.10.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan		100%	100.000.000	APBD		100%	110.000.000
<b>5.02.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>Sekretariat BKD</b>	<b>100%</b>	<b>468.087.310</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>514.896.041</b>
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan		100%	8.000.000			100%	8.800.000
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		100%	400.087.310	APBD		100%	440.096.041

5.02.01.2.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	cakupan konsumsi rapat, konsumsi tamu dan konsumsi pimpinan yang disediakan		100%	60.000.000	APBD		100%	66.000.000
<b>5.02.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menyampaikan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>565.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>622.050.000</b>
5.02.01.2.09.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jabatan yang disediakan		100 %	50.000.000	APBD		100 %	55.000.000
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Cakupan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan		100%	200.000.000	APBD		100%	220.000.000
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara		100%	115.500.000	APBD		100%	127.050.000
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan gedung kantor yang dipelihara		100%	100.000.000	APBD		100%	110.000.000
5.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		100%	100.000.000			100%	110.000.000
<b>5.02.02.</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>4.142.066.541</b>	<b>APBD</b>			<b>4.477.425.934</b>

<b>5.02.02.2.01.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>				<b>1.009.700.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.110.670.000</b>
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS		100%	121.400.000	APBD		100%	133.540.000
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Persentase tercapainya Kesepakatan KUA PPAS Perubahan		100%	124.500.000	APBD		100%	136.950.000
5.02.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi		100%	43.600.000	APBD		100%	47.960.000
5.02.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen RKA SKPD yang terverifikasi		100%	46.200.000	APBD		100%	50.820.000
5.02.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA dan DPA Perubahan SKPD yang dilakukan review		100%	23.800.000	APBD		100%	26.180.000
5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPA SKPD Perubahan yang terverifikasi		100%	22.900.000	APBD		100%	25.190.000
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase tercapainya Perda tentang APBD		100%	223.500.000			100%	245.850.000
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase tercapainya Perda tentang Perubahan APBD		100%	181.600.000			100%	199.760.000

5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase tercapainya Regulasi di Bidang Anggaran		100%	59.000.000	APBD		100%	64.900.000
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan		100%	21.800.000	APBD		100%	23.980.000
5.02.02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan Belanja Daerah		100%	141.400.000	APBD		100%	155.540.000
<b>5.02.02.2.02.</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>				<b>334.900.000</b>	<b>APBD</b>			<b>364.360.000</b>
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu		100%	40.300.000	APBD		100%	40.300.000
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Pengendalian administrasi penyediaan dana		100%	23.400.000	APBD		100%	25.740.000
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan		100%	174.000.000	APBD		100%	191.400.000

5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	Jumlah laporan rekapitulasi pemotongan pajak pegawai/pihak ketiga		100%	5.300.000	APBD		100%	5.830.000
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu		100%	42.700.000	APBD		100%	46.970.000
5.02.02.2.02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen	49.200.000	APBD		1 dokumen	54.120.000
<b>5.02.02.2.03.</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>Bidang Akuntansi dan Pelaporan</b>	<b>100%</b>	<b>395.900.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>435.490.000</b>
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu		100%	4.200.000			100%	4.620.000

5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen	9.700.000	APBD		1 dokumen	10.670.000
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan yang disusun		7 Laporan	252.400.000	APBD		7 Laporan	277.640.000
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen	73.400.000	APBD		1 dokumen	80.740.000
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen		2 dokumen	5.300.000	APBD		2 dokumen	5.830.000
5.02.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen		2 dokumen	11.400.000	APBD		2 dokumen	12.540.000
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi		29 OPD	39.500.000	APBD		29 OPD	43.450.000

5.02.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			100%	2.023.393.931	APBD		100%	2.188.733.324
5.02.02.2.04.03.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen	370.000.000	APBD		1 dokumen	370.000.000
5.02.02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya belanja tidak terduga		100%	1.653.393.931	APBD		100%	1.818.733.324
5.02.02.2.05.	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>				378.172.610	APBD			378.172.610
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	378.172.610	APBD		1 dokumen	378.172.610
5.02.03.	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				817.400.000	APBD			899.140.000
5.02.03.2.01.	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				817.400.000				899.140.000

5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen RKBMD		100%	17.300.000	APBD		100%	19.030.000
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD berupa laporan semesteran dan tahunan		2 dokumen	78.900.000			2 dokumen	86.790.000
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen		1 dokumen	25.000.000	APBD		1 dokumen	27.500.000
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kepemilikan BMD		1 dokumen	468.000.000	APBD		1 dokumen	514.800.000
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penilaian BMD		1 dokumen	34.000.000	APBD		1 dokumen	37.400.000
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		4 dokumen	143.000.000	APBD		1 dokumen	157.300.000

5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sinkronisasi Penatausahaan dan penyajian laporan barang untuk daerah kota singkawang		2 kegiatan	51.200.000	APBD		2 kegiatan	56.320.000
<b>5.02.04.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target</b>		<b>100%</b>	<b>3.099.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3.409.450.000</b>
<b>5.02.04.2.01.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pajak Daerah Sektor PBB dan BPHTB</b>	<b>Bidang Pendapatan (Bidang Wasdal &amp; Bidang P3D)</b>	<b>7,89%</b>	<b>3.099.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>7,89%</b>	<b>3.409.450.000</b>
5.02.04.2.01.01.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	121.500.000	APBD		1 dokumen	133.650.000
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		2 dokumen	67.000.000	APBD		2 dokumen	73.700.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	460.000.000	APBD		1 dokumen	506.000.000

5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan sarana dan prasarana pajak daerah yang diadakan		100%	555.800.000	APBD		100%	611.380.000
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	67.500.000	APBD		1 dokumen	74.250.000
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	224.000.000	APBD		1 dokumen	246.400.000
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	137.000.000	APBD		1 dokumen	150.700.000
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	540.000.000	APBD		1 dokumen	594.000.000
5.02.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	242.200.000	APBD		1 dokumen	266.420.000
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	297.000.000			1 dokumen	326.700.000
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	141.600.000			1 dokumen	155.760.000
5.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	37.600.000			1 dokumen	41.360.000

5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	149.000.000			1 dokumen	163.900.000
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		1 dokumen	59.300.000			1 dokumen	65.230.000
<b>TOTAL</b>					<b>25.421.853.851</b>				<b>27.885.191.975</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun 2022 Renja tahun 2022 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022 dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang tahun 2022.

Renja tahun 202 akan menjadi pedoman Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2022. Selain itu, Renja tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, akan dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Singkawang, Juni 2021  
Kepala Badan Keuangan Daerah

**WIDATOTO.S, S.E., M.T**  
Pembina Tk I  
NIP 19690403 199710 1 001